



BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO
dan
BUPATI TEBO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 982.687.248.033,00 bertambah sejumlah Rp. 30.184.968.593,88 sehingga menjadi Rp. 1.012.872.216.626,88 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 942.687.248.033,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. (9.018.470.140,12)Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 933.668.777.892,88
2. Belanja
 - a. Semula Rp. 982.687.248.033,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp. 29.996.825.593,88Jumlah Bertambah Setelah Perubahan Rp. 1.012.684.073.626,88
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (79.203.438.734,00)

3. Pembiayaan
- a. Penerimaan
- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Semula | Rp. 40.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 44.502.695.549,00</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. 84.502.695.549,00 |
- b. Pengeluaran
- | | |
|--|-----------------------------|
| Semula | Rp. 0,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.299.256.815,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 5.299.256.815,00 |
| Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan | Rp. 79.203.438.734,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp. 0,00 |

Pasal 2

1. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| Semula | Rp. 53.754.387.133,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 17.579.796.613,88</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 71.334.183.746,88 |
- b. Dana Perimbangan
- | | |
|---|--------------------------------|
| Semula | Rp. 762.841.960.900,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. (57.523.940.063,00)</u> |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp. 705.318.020.837,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- | | |
|---|------------------------------|
| Semula | Rp. 126.090.900.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 30.737.530.309,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah Yang sah setelah perubahan | Rp. 156.828.430.309,00 |
2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- | | |
|---|---------------------------|
| Semula | Rp. 13.449.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 147.000.000,00</u> |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp. 13.596.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| Semula | Rp. 16.826.250.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 12.756.427.860,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp. 29.582.677.860,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|--|-----------------------------|
| Semula | Rp. 5.000.000.000,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.966.672.348,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 6.966.672.348,88 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------------|
| Semula | Rp. 18.479.137.133,00 |
| Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 2.709.696.405,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah | Rp. 21.188.833.538,00 |

yang sah setelah perubahan

3. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
 - Semula Rp. 151.825.265.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. (14.618.967.163,00)
 - Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 137.206.297.837,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - Semula Rp. 560.336.665.900,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. (53.183.512.900,00)
 - Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 507.153.153.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - Semula Rp. 50.680.030.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 10.278.540.000,00
 - Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 60.958.570.000,00
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Hibah
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Dana darurat
 - Semula Rp. 0,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak
 - Semula Rp. 28.088.000.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 2.273.121.309,00
 - Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 30.361.121.309,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - Semula Rp. 86.002.900.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 26.464.409.000,00
 - Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp. 114.467.309.000,00
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya
 - Semula Rp. 12.000.000.000,00
 - Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp. 12.000.000.000,00

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung

Semula	Rp.	460.157.932.853,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>49.842.910.437,88</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp.		510.000.843.290,88
 - b. Belanja Langsung

Semula	Rp.	522.529.315.180,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(19.846.084.844,00)</u>	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp.		502.683.230.336,00
2. Belanja Tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja Pegawai sejumlah

Semula	Rp.	373.696.830.763,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>22.582.426.268,88</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp.		396.279.257.031,88
 - b. Belanja Bunga

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.		0,00
 - c. Belanja Subsidi

Semula	Rp.	5.346.056.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.402.056.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp.		3.944.000.000,00
 - d. Belanja Hibah

Semula	Rp.	2.213.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>600.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp.		2.813.000.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>4.054.440.659,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp.		4.054.440.659,00
 - f. Belanja bagi hasil

Semula	Rp.	3.027.525.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		3.027.525.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan

Semula	Rp.	75.374.521.090,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>23.758.099.510,00</u>	
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.		99.132.620.600,00

h. Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	500.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>250.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp.		750.000.000,00

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	44.125.600.990,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.154.868.500,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.		46.280.469.490,00

b. Belanja Barang dan Jasa			
Semula	Rp.	149.318.537.882,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>7.435.560.278,00</u>	
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.		156.754.098.160,00

c. Belanja Modal			
Semula	Rp.	329.085.176.308,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(29.436.513.622,00)</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp.		299.648.662.686,00

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan			
Semula	Rp.	40.000.000.000,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>44.502.695.549,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.		84.502.695.549,00

b. Pengeluaran			
Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>5.299.256.815,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.		5.299.256.815,00

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SILPA Tahun Anggaran 2014			
Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp.		0,00

b. Pencairan Dana cadangan			
Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
Semula	Rp.	0,00	
Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah Yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.		0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.			0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah penerimaan kembali pemberian sebelumnya setelah perubahan	Rp.			0,00
f. Penerimaan piutang daerah				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan	Rp.			0,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:				
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.			0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp.			0,00
c. Pembayaran pokok utang				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp.			0,00
d. Pemberian pinjaman daerah				
Semula	Rp.	0,00		
Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>		
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.			0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali pada tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dari Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Oktober 2015.

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 12 Oktober 2015.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO/PROVINSI JAMBI
(4 Tahun 2016).